



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI KAMIS, 25 APRIL 2013



DAFTAR ISI

Tol Bali	1
Angkasa Pura II	2
Proyek MRT	3
Smelter	4



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalan Tol Bali Segera Beres	<ul style="list-style-type: none">- Paket dua saat ini masih ditargetkan dua minggu lagi akan selesai. Saat ini masih menunggu aspal untuk dipasang- Sedangkan untuk paket empat sedang dalam tahap penyelesaian. Tinggal pemasangan beberapa rambu-rambu lalu lintas lainnya- Target proyek ini bisa mulai dioperasikan sesuai rencana pertengahan tahun ini sehingga bisa mendukung pelaksanaan APEC nanti		2013		PT. Waskita Karya	

Jalan Tol Bali
Segera Beres

Akhir Mei, Dahlan Akan
Meninjau Langsung

JAKARTA - Direktur Operasional IPT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan, pembangunan paket dua jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Bali akan segera selesai. "Paket dua saat ini masih ditargetkan dua minggu lagi akan selesai. Saat ini masih menunggu aspal untuk dipasang, karena kita menunggu distribusi aspal," ujar Desi ditemui di gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu petang (24/4).
Sedangkan untuk paket empat, lanjut Desi, sedang dalam tahap penyelesaian. Tinggal pemasangan beberapa rambu-rambu lalu lintas dan atribut lalu lintas lainnya. "Masih juga ada beberapa jalan yang harus disempurnakan," imbuh Desi.
Sekadar informasi, paket dua yang dikerjakan Waskita Karya

berada di area Benoa, tepatnya berada di atas laut dangkal dengan jumlah pemancangan sebanyak 3.048 titik di jalan sepanjang 2,4 kilometer. Sedangkan paket empat sebanyak 3.611 titik, pemancangannya mencakup simpang susun Benoa sepanjang 2,2 kilometer.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku sangat senang lantaran pembangunan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Bali sebentar lagi akan rampung.
Dahlan bahkan tampak tak sabar untuk meninjau jalan tol tersebut pada Mei mendatang. "Akhir Mei nanti saya sudah bisa meninjau ke sana lagi dan ditargetkan jalan tolnya sudah menyambung, sehingga sudah bisa dilewati mobil," ujar Dahlan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu petang (24/4).
Mantan dirut PLN ini sempat beberapa kali melakukan inspeksi ke proyek pembangunan jalan tol tersebut untuk mengecek perkembangannya. Saat ini, kata

Dahlan, pengerjaan jalan tol tersebut dalam tahap akhir.
Sekadar diketahui, target proyek ini bisa mulai dioperasikan sesuai rencana, pertengahan tahun ini. "Sehingga bisa mendukung pelaksanaan APEC nanti," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada Oktober 2013 mendatang. Rencananya, perhelatan yang juga akan dihadiri beberapa pemimpin negara di dunia itu akan dipusatkan di kawasan Nusa Dua.
Jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dengan panjang 10 kilometer di atas laut dangkal dan sekitar 2 kilometer di atas tanah darat juga merupakan jalan akses. Pengerjaannya terbagi atas empat paket. Paket 1 dan 3 dikerjakan oleh JO Wika-Adhi-Hutama, serta paket 2 dan 4 oleh PT Waskita Karya.
Jumlah titik pancang sebagai pondasi jalan mencapai 13.600 titik dengan jumlah tiang pancang sebanyak 33.814 tiang (chi/jpnn)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
AP II Putuskan Setor ke Kota Tangerang	<div>- Dalam pendapat hukum itu diputuskan kalau pajak Terminal I,II,III serta terminal kargo sejak 2012 dan selanjutnya disetorkan kepada Pemerintah Kota Tangerang</div> <div>- Pihak PT. AP II berharap perselisihan antara Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang terkait pajak bisa diselesaikan</div>				PT. Angkasa Pura II	

AP II Putuskan Setor ke Kota Tangerang

Terkait Saling Klaim Pajak Bandara Soekarno-Hatta

TANGERANG-PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) meminta ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga pemerintah terkait saling klaim lahan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Pasalnya, klaim lahan itu berujung saling klaim pembayaran pajak.

Senior General Manager PT AP II, Bram Baroto mengatakan pengelola Bandara Soetta tidak menginginkan adanya dilematis terkait saling klaim antara Pemkot Tangerang dengan Pemkab Tangerang terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan seluas 17.388.255 meter persegi di Desa Bojong Renget. Karena lahan



itu diperebutkan dua daerah tersebut.

Kini di lahan itu berdiri Terminal II, Terminal III dan sejumlah fasilitas seperti restoran dan toko, tempat parkir dan reklame. Di atas lahan itu juga berdiri Terminal Haji yang kini tengah diperluas. "Kami hanya bisa mengimbau pihak-pihak terkait duduk bersama. Jangan sampai kami yang taat aturan membayar pajak dibingungkan dengan persoalan ini (saling klaim lahan. Red)," terangnya kepada INDOPOS, kemarin (24/4).

Saling klaim antara Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang bisa dimaklumi lantaran Desa Bojong Renget yang berada di perbatasan kedua daerah tersebut. Kedua pemerintah daerah (pemda, Red) tersebut tidak mau kehilangan retribusi pajak bernilai puluhan miliar yang masuk ke kas daerah yang disetorkan PT AP II tiap tahunnya.

Bram juga mengatakan, terkait persoalan itu pihaknya telah mengajukan surat pertimbangan hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang. Akhirnya balasan surat pendapat hukum dari Kejari Tangerang tertanggal 2 Februari 2012 diterima jajaran PT AP II terkait masalah pelik tersebut.

Dalam pendapat hukum itu diputuskan kalau pajak Terminal I, II, III serta Terminal Kargo sejak 2012 dan selanjutnya disetorkan kepada Pemkot Tangerang. Atas legal opinion itu, pajak retribusi bandara tidak lagi berikan kepada Pemkab Tangerang. "Berdasarkan aspek hukum dari Kejari Tangerang ini yang kami ikuti. Maka, pajak kami setorkan ke Pemkot Tangerang," cetusnya.

Untuk tahun 2012 pajak retribusi

parkir yang disetorkan PT AP II kepada Pemkot Tangerang sebesar Rp 17,2 miliar. Sedangkan kontribusi pembayaran Pajak Bumi Bangun (PBB) yang disetorkan PT AP II kepada Pemkot Tangerang pada tahun yang sama mencapai Rp 37, 459 miliar. PT AP II juga menyerahkan pajak kepada Pemkab Tangerang Rp 14,171 miliar.

Sementara General Manager Affair Kantor Cabang Pt AP II, Yudis Tiawan mengatakan, pajak yang disetor kepada Pemkot Tangerang dari PT AP II hanya pajak retribusi parkir Terminal I, II, III dan Terminal Kargo. Sedangkan setoran pajak reklame dan restoran yang ada di Bandara Soetta diserahkan oleh pelaku usaha bersangkutan kepada Pemkot Tangerang langsung.

Pihak PT AP II berharap perselisihan antara Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang terkait pajak bisa diselesaikan. Perseteruan rebutan lahan bandara yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian karena Pemprov Banten tidak segera menyelesaikannya. Padahal sengketa Desa Bojong Renget di perbatasan kedua daerah itu terjadi sejak 20 tahun lalu.

Saat Kota Tangerang memisahkan diri dari induknya, Kabupaten Tangerang setelah dimekarkan tahun 1993 lalu. Yudis berharap konflik rebutan lahan ini diselesaikan Kemendagri dan Pemprov Banten. "Perselisihan ini harus diselesaikan. Pemprov Banten yang menaungi Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang harus menengahi. Kemendagri berkewajiban karena menyangkut sengketa lahan," kata Yudis juga. (gin)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek MRT Bisa Mangkrak Lagi	<div>- Kalangan politisi melihat anyakhal penting yang tidak diperhatikan jajaran direksi PT. MRT Jakarta. Yakni terkait pemenuhan administrasi serta pelaksanaan yang harus mengacu berpayung hukum seperti halnya perubahan presentase</div> <div>- Perihal besaran tarif yang akan diberlakukan bagi penumpang harus ada kejelasan, sebab penentuan tarif berdampak pada subsidi</div>				- PT. MRT Jakarta	

Proyek MRT Bisa Mangkrak Lagi

Anggota Dewan Nilai Persiapan Semrawut

DPRD DKI Jakarta menilai pelaksanaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) akan menjumpai persoalan hukum. Pasalnya proyek tersebut mengalami sejumlah perubahan perjanjian, sehingga harus disesuaikan dengan payung hukum berlaku. Salah satunya yakni dengan merevisi Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta.

Hujan kritik terlihat dalam rapat kerja antara Komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Jakarta dengan jajaran direksi PT MRT Jakarta, kemarin (24/4). Dalam pertemuan tersebut dipaparkan sejumlah kronologis terkait dengan pelaksa-

naan pembangunan MRT yang mangkrak sejak lima tahun silam.

Seperti diketahui, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan jajaran direksi PT MRT Jakarta pada bulan Mei 2013. Keberadaan direksi yang baru diharapkan bisa bekerja keras dalam mempercepat proses pembangunan infrastruktur MRT. "Kami harus mengerjakan keterlambatan selama lima tahun dalam lima bulan," ujar Dirut PT MRT Jakarta Dono Boestami.

Sementara kalangan politisi di Kebon Sirih justru melihat banyak hal penting yang tidak diperhatikan jajaran direksi PT MRT Jakarta. Yakni terkait dengan pemenuhan administrasi serta pelaksanaan yang harus mengacu berpayung hukum

► Baca *Proyek*. Hal 15

Sambungan dari halaman 9

Seperti halnya perubahan presentase kewajiban pengembalian hutang kepada Japan International Corporate Agency (JICA). Semula DKI harus menanggung hutang 48 persen dan 42 persen pemerintah pusat, kini menjadi 49 persen DKI dan 51 persen pemerintah pusat dari 125 milyar yen. Kondisi tersebut tentunya harus diiringi dengan revisi peraturan daerah terkait. "Perda yang menjadi acuan harus direvisi dulu," tandas Ketua Komisi B Selamat Nurdin.

Tak hanya itu, proses pembangunan yang menggunakan lahan di bawah tanah juga harus memiliki payung hukum. Bila tidak, bisa menimbulkan persoalan baru. "Harus ada perda terkait dengan izin penggunaan bawah tanah, tidak cukup hanya dengan menggunakan SK gubernur," ungkap Nurdin.

Menurut Nurdin, masih banyak persoalan payung hukum dan administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar pembangunan MRT bisa berjalan maksi-

mal. Belum lagi dengan banyak aksi protes yang dilayangkan masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan MRT. "Seperti masyarakat di kawasan Fatmawati yang menolak, ini harus ada pendekatan yang baik," tutur dia.

Sementara Anggota Komisi B Ridho Kamaludin menyorot perihal besaran tarif yang akan diberlakukan bagi penumpang MRT. "Ada yang bilang akan diberlakukan tarif Rp 15 ribu dan tawaran tarif lainnya. Ini juga harus ada kejelasan, sebab penentuan tarif berdampak pada subsidi," beber dia.

Bahkan Ridho menegaskan, berbagai perubahan yang belum diikuti dengan revisi aturan bisa berdampak pada penyertaan modal daerah (PMD). "Karena ini menggunakan dana APBDm dan telah terjadi perubahan-perubahan. Maka PMD tak boleh diberikan. Ini semua terjadi karena Pemprov DKI menghambat proses pelaksanaan pembangunan MRT. Kajian-nya juga kelamaan. Semula gubernur mengkaji tarif, minta serendah mungkin. Namun sampai sekarang belum bisa menentukan tarif," sergahnya. (rul)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

☐ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☒ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Republika | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan | <input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat |
| <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia | <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Kontan |
| <input type="checkbox"/> Suara Karya | <input type="checkbox"/> Neraca | <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Indopos |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain, | | | |

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Freeport Boleh Tak Bangun Smelter	<ul style="list-style-type: none">- Freeport boleh saja hanya menyuplai bahan mineral mentah untuk dijadikan bahan jadi di pabrik smelter yang ada- Kebijakan tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan pemerintah sebelumnya					

Freeport Boleh tak Bangun Smelter

■ Sefti Oktarianisa

JAKARTA — Pemerintah akan memberikan keistimewaan bagi Freeport untuk tidak perlu membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (*smelter*). Namun, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengolahan dan pemurnian.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite menyatakan, perusahaan itu tak harus membangun *smelter*. Menurutnya, Freeport boleh saja hanya menyuplai bahan mineral mentah untuk dijadikan bahan jadi di pabrik *smelter* yang ada.

"Misalnya, yang bangun *smelter* Indosmelt dan Nusantara Smelting, tapi pasokan dari Freeport," katanya, Rabu (24/4). Tapi, ia menuturkan, sebenarnya sebagai perusahaan besar dengan cadangan mineral dan emas yang banyak, Freeport seharusnya membangun *smelter*.

Sedangkan, untuk perusa-

haan besar lainnya yang tak mau membangun *smelter*, Thamrin mengatakan, Kementerian sudah melakukan komunikasi. "Kita sudah undang mereka untuk membicarakan tentang prospek *smelter*, sesuai komoditas mereka, misal tembaga," jelasnya.

Kebijakan tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan pemerintah sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Hattajasa baru-baru ini mengatakan, Freeport harus segera merealisasikan pembangunan *smelter*. "Tentu karena ini perintah undang-undang. Jadi, harus jalan," tuturnya.

Di dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan tak akan mengizinkan ekspor mineral pada 2014 tanpa proses pengolahan dan pemurnian. Ini penting untuk melindungi barang mineral RI agar tak dikirim secara mentah ke luar. Hatta bahkan menjanjikan akan memberikan insentif asalkan perusahaan asal Amerika Serikat itu mau membangun pabrik tersebut.

Sementara itu, pada Mei mendatang, Kementerian

ESDM akan memutuskan hasil studi kelayakan 285 proposal pembangunan *smelter* oleh perusahaan tambang. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) ESDM Sutijastoto, nantinya perusahaan tambang akan diberikan masukan tentang laik atau tidaknya rencana pembangunan *smelter* yang mereka ajukan.

Sutijastoto menyatakan, penilaian kelayakan proposal tersebut mempertimbangkan lokasi pabrik, pembiayaan, hingga insentif yang diminta. Berdasarkan data 2012 lalu, hingga kini setidaknya ada 11 proposal *smelter* yang disetujui pembangunannya. Antara lain *smelter* nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, yang dibangun PT Antam (Persero) Tbk dengan investasi 1 miliar dolar AS.

Ada pula PT Stargate Pacific Resources yang membangun *smelter* nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan investasi 1,8 miliar dolar AS. *Smelter* besi di Batu Licin, Kalimantan Selatan, milik PT Meratus Jaya Iron Steel senilai 110 juta dolar AS.

■ ed: fitria andayani